

## **ABSTRAK**

**Monica Claudia:** Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. **Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2022**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data disimpulkan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di badan keuangan daerah kota Pontianak belum berjalan maksimal, karena kurangnya sumber daya manusia di dalam melaksanakan pekerjaan, kurangnya suri tauladan yang baik dalam menerapkan disiplin pegawai, dan kurang optimalnya dalam memberikan hukuman bagi pegawai yang melanggar kedisiplinan.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  
Kinerja Pegawai

## RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak*”. Judul ini dipilih karena masih banyak pegawai ASN di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang masih belum melaksanakan dan mentaati Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Hal ini disebabkan masih kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap ASN. Selain itu kurangnya motivasi dari para pelaksana atau pegawai itu sendiri untuk mengikuti dan mentaati aturan tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III yaitu tentang empat variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan.

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di badan keuangan daerah kota Pontianak belum optimal khususnya pada variabel Sumber Daya dan Disposisi. Beberapa penyebab belum optimalnya ialah keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan ruangan. Selain itu masih kurangnya sanksi tegas, dan kesadaran diri dari para pelaksana atau pegawai dalam mentaati Peraturan Pemerintah No. 53

Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Pegawai Di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Saran untuk penelitian sebagai berikut: 1) Komunikasi, masih perlu diadakannya sosialisasi yang intens mengenai kebijakan PP No. 53 Tahun 2010 di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak perihal mekanisme disiplin PNS atau seminar tentang peraturan tersebut agar setiap PNS memahami peraturan itu. 2) Sumber Daya, Penting sekali untuk melengkapi sarana yang mendukung aktifitas kinerja, seperti ruangan untuk penyimpanan arsip atau dokumen agar tidak memenuhi ruangan kerja, sehingga para pegawai dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Selain itu perlunya melaksanakan wewenang dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memberikan sanksi. 3) Disposisi, pentingnya kesadaran dari para implementor dan pelaksana dalam kedisiplinan, sehingga tidak menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap para ASN. Selain itu perlu adanya pemberian *reward* atau penghargaan kepada pegawai dalam melaksanakan kinerja, sehingga akan memotivasi para ASN untuk lebih disiplin dan lebih giat dalam meningkatkan kinerja. 4) Struktur Birokrasi, Tercapainya tujuan-tujuan kebijakan publik secara efektif dan efisien tidak terlepas dari pengaruh struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan publik. Oleh karena itu pentingnya untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur harus dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak mengganggu sistem lainnya.